**POLITIK ETIS: HOLLANDSCH INDISCHE SCHOOL DI YOGYAKARTA PADA AWAL ABAD KE-20**

***ETICHAL POLITIC: HOLLANDSCH INDISCHE SCHOOL IN YOGYAKARTA IN THE EARLY 20TH CENTURY***

**Fennytya Rizana**

**Universitas Negeri Yogyakarta**

 email : fennytya17@gmail.com

**Abstrak**

*Penelitian mengenai sejarah politik etis yang dipusatkan untuk membangun irigasi, menyelenggarakan emigrasi, dan memberikan pendidikan bagi bangsa Indonesia dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan sistem pendidikan di masa lampau. Politik etis menuntut bangsa Indonesia untuk menuju ke arah kemajuan, namun tetap bernaung di bawah penjajahan Belanda. Dampak politik etis yang sangat menonjol adalah program edukasi atau pendidikan. Adanya pendidikan bagi bangsa Indonesia salah satunya Hollandsch Indische School (HIS) yang juga terdapat di Yogyakarta dapat merubah pemikiran bangsa Indonesia untuk berpikir dengan lebih maju, dan banyak melahirkan tokoh cendekiawan lokal yang cerdas dan memiliki pemikiran yang setara dengan orang-orang dari bangsa Barat. Metode penelitian yang digunakan yaitu; (1) Penelitian Historis untuk membuat rekonstruksi masa lalu,; (2) Penelitian Deskriptif untuk membuat deskripsi mengenai Holladsch Indische School (HIS) secara faktual dan akurat; (3) Penelitian Perkembangan untuk mengetahui perubahan dan perkembangan dari Hollandsch Indische School (HIS).*

***Kata Kunci :*** *Politik Etis, Holladsch Indische School, Yogyakarta*

***Abstract***

*Research on the history of ethical politic that focused on building irrigation, organizing emigration, and providing education for the Indonesian people is carried out to find out the development and education system in the past. Ethical politic requires the Indonesian people to move towards progress, but still take shelter under the Dutch colonialism. The impact of ethical politic that is very prominent is educational or educational programs. The existence of education for the Indonesian people, one of which is the Holladsch Indische School (HIS), which also in Yogyakarta, can change the minds of the Indonesian to think in a more advanced way, and give birth to many local intellectual figures who are smart and have thoughts that are on par with those of Western nations. The research method that used is; (1) Historical research to make reconstruction of the past; (2) Descriptive Research to make a factual and accurate description of Hollandsch Indische School (HIS); (3) Developmental Research to determine changes and development in Hollandsch Indische School.*

***Keywords :*** *Ethical Plitics, Hollandsch Indische School, Yogyakarta*

**Latar Belakang**

Sejak dahulu, banyak bangsa di dunia yang tertarik dan ingin menguasai Indonesia terutama bangsa Barat, salah satunya Belanda. Hal ini dikarenakan oleh letak Indonesia yang sangat strategis dan kekayaan alamnya yang berlimpah ruah. Masa penjajahan di Indonesia yang dilakukan oleh bangsa Belanda tidak langsung dimulai ketika orang-orang Belanda menginjakkan kaki di bumi Nusantara pada akhir abad ke-16, melainkan penjajahan Belanda merupakan proses ekspansi politik yang lambat, bertahap dan berlangsung selama beberapa abad. Pada masa penjajahan kolonial Belanda di Indonesia yang dulunya bernama Hindia-Belanda, penjajahan terjadi sangat lama dan dengan dampak yang sangat memprihatinkan bagi rakyat kita pada masa itu. Dari diberlakukannya tanam paksa, sewa tanah, kerja rodi sampai minimnya pendidikan dan pengetahuan pada masa itu membuat bangsa kita kesulitan dan tunduk pada kekuasaan Belanda selama kurang lebih 350 tahun.

Akibat tindakan eksploitasi yang dilakukan Belanda kepada Indonesia pada masa itu, Belanda akhirnya mendapatkan banyak kritik keras dari dunia internasional. Salah satunya mengenai kebijakan tanam paksa yang dilakukan oleh Belanda yang menyebabkan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Kritik-kritik tersebut pada akhirnya didengar pula oleh pihak Belanda. Setelah mendapat banyak kritikan dan desakan, Belanda akhirnya menerapkan kebijakan baru untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kebijakan baru tersebut membuat adanya perkembangan baru dalam politik Belanda di Indonesia. Politik baru tersebut disebut dengan *Ethische Politic,* yang berarti politik haluan utama.

Sebagai salah satu bidang Politik Etis, pendidikan memiliki peran yang cukup besar pada perkembangan dan perubahan di masyarakat pribumi masa itu. Pendidikan yang muncul pada masa itu merupakan alternatif kepada bangsa Indonesia. Beberapa instansi pendidikan dibangun dan dioperasikan yang mana merupakan lembaga pendidikan dengan sistem yang berlaku di Barat. Pendidikan di Jawa, khususnya di Yogyakarta telah membawa bangsa Indonesia yang sebelumnya tidak berdaya dan tidak tahu mengenai ilmu-ilmu, menjadi kuat dengan berbekal ilmu-ilmu pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan selama bersekolah.

Keberadaan sekolah-sekolah yang didirikan Belanda di Indonesia, terutama di Yogyakarta meski dalam perkembangannya banyak dibahas, namun pada kenyataannya masih belum banyak yang mengetahui secara detail. Sekolah-sekolah ini ada beberapa yang masih bertahan dan digunakan hingga masa pendudukan Jepang, bahkan hingga sekarang, namun tidak banyak orang yang mengetahuinya. Berdasarkan latar belakang ini, maka penulis memutuskan untuk meneliti dan mengkaji mengenai salah satu jenjang pendidikan sekolah yang didirikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda, yaitu “*Hollandsch Indische School*” atau yang juga disingkat HIS di Yogyakarta sejak awal berdirinya pada awal abad ke-20, hingga sekarang bersamaan dengan pembahasan mengenai Politik Etis itu sendiri sebagai awal mula diadakannya aturan pendidikan di Nusantara bagi kaum pribumi.

**Metode Penelitian**

 Peneliti menggunakan tahapan penelitian sebagaimana yang diungkapkan oleh Sjamsuddin (2007:85-155), yaitu pengumpulan sumber atau heuristik, kritik, sumber, serta interpretasi dan penulisan sejarah atau historiografi.

1. Heurisik adalah teknik untuk mencari dan mengumpulkan sumber-sumber yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Berdasarkan bentuk penyajiannya, sumber-sumber sejarah terdiri atas arsip, buku, dokumen, majalah/jurnal, surat kabar, dan lain-lain. Data sejarah dapat pula didapatkan melalui berbagai cara selain studi pustaka (Alian, 2012: 9-10).
2. Kritik sumber adalah sebuah proses untuk menguji sebuah sumber, apakah sumber yang akan digunakan ini asli atau palsu melalui kritik ekstern, dan apakah sumber yang didapat dapat dipercaya atau tidak. Sumber yang didapat harus dilakukan penentuan dapat tidaknya keterangan dalam dokumen digunakan sebagai fakta sejarah melalui kritik intern (Aminudin Kasdi dalam Hermanto, 2018).
3. Interpretasi menyatakan bahwa menganalisi data-data sejarah, penulis atau peneliti berusaha untuk menghubungkan fakta atau berusaha untuk dapat memberikan penafsiran apa yang ada di dalam penulisan laporan penelitian ini (Kuntowijoyo, 1994: 100). Penafsiran akan suatu fakta harus dilandasi oleh sikap yang obyektif. Rekonstruksi peristiwa sejarah haruslah menghasilkan sejarah yang benar atau mendekati kebenaran.
4. Historiografi adaalah proses merangkaikan fakta beserta maknanya secara kronologis/diakronik dan sistematis, sehingga dapat menjadi sebuah tulisan sejarah sebagai kisah. Kedua sifat uraian itu harus benar-benar terlihat, karena kedua hal tersebut merupakan bagian dari ciri karya sejarah ilmiah, sekaligus ciri sejarah sebagai ilmu. Historiografi juga merupakan suatu perpaduan antara karya seni dan kemampuan berpikir kritis, serta analitis (Gottschalk, 2008: 39-40).

**Hasil dan Pembahasan**

1. **Awal Mula Adanya Politik Etis**

Masa penjajahan kolonial Belanda di Indonesia yang dulunya bernama Hindia-Belanda terjadi sangat lama dan memberikan dampak yang sangat memprihatinkan bagi rakyat kita pada masa itu, dari diberlakukannya tanam paksa, sewa tanah, kerja rodi sampai minimnya pendidikan dan pengetahuan pada masa itu membuat bangsa kita kesulitan dan tunduk pada kekuasaan Belanda selama kurang lebih 350 tahun. Akibat tindakan eksploitasi yang dilakukan Belanda kepada Indonesia pada masa itu, Belanda akhirnya mendapatkan banyak kritik keras dari dunia internasional.

Kritik-kritik tersebut pada akhirnya didengar oleh pihak Belanda yang akhirnya menerapkan kebijakan baru untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kebijakan baru tersebut disebut dengan Politik Etis atau *Ethische Politic,* yang berarti politik haluan utama. Politik Etis (*Etische Politiek*) atau yang bisa juga disebut dengan politik balas budi adalah pemikiran progresif bahwa pemerintah Belanda memiliki kewajiban moral untuk mengantarkan dan mendorong orang Jawa atau yang dalam hal ini juga seluruh wilayah Hindia-Belanda ke arah kesejahteraan karena telah memberikan kemakmuran bagi masyarakat dan kerajaan Belanda.[[1]](#footnote-2) Definisi Politik Etis lainnya adalah sebuah pemikiran yang menjelaskan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral untuk kesejahteraan bumiputera. Politik Etis merupakan kebijakan yang diarahkan untuk meletakkan seluruh kepulauan Indonesia di bawah kekuasaan Belanda secara nyata, dan untuk mengembangkan negeri dan bangsa di wilayah itu ke arah pemerintahan sendiri di bawah pimpinan Negeri Belanda menurut model Barat.

Pemikiran tersebut merupakan kritik terhadap politik tanam paksa yang berlangsung di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Paling sedikit terdapat dua faktor yang berperan di balik pemberlakuan Politik Etis. Pertama, kegagalan sistem Tanam Paksa untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan rakyat telah melahirkan berbagai bentuk protes baik dalam bentuk pemberontakan dengan jalan kekerasan maupun dalam bentuk lain.[[2]](#footnote-3) Politik etis berakar pada masalah kemanusiaan dan sekaligus pada keuntungan ekonomi yang ada. Kecaman-kecaman terhadap pemerintah kolonial Belanda yang dilontarkan dalam novel Max Havelaar (1860) dan dalam berbagai pengungkapan lainnya mulai membuahkan hasil. Semakin banyak suara Belanda yang mendukung pemikiran untuk mengurangi penderitaan rakyat Jawa yang tertindas.

Kemauan dari politik etis yang diberikan oleh bangsa Belanda terhadap bangsa Indonesia, untuk menumbuhkan kesadaran diri dan perasaan individualisme pada elit baru Indonesia yang berpendidikan Barat itu sebenarnya suatu pengurangan terus menerus yang meningkatkan martabat mereka. Hal ini berakibat pada pengurangan kekuasaan tata pemerintahan pribumi (Van Niel, Robert, 1984: 58). Tokoh pencetus dan yang mempelopori adanya kebijakan Politik Etis adalah Pieter Brooshooft yang merupakan wartawan *De Locomoief* dan C.Th. Van Deventer. Pada tahun 1899, van Deventer menulis sebuah tulisan yang berjudul “*Een Eerreschuld* atauHutang Budi” yang diterbitkan pada harian *De Gids*. Van Deventer menganggap bahwa masyarakat Hindia Belanda sudah cukup mengalami penderitaan dalam upaya untuk memakmurkan perekonomian negara Belanda. Ratu Wilhelmia yang pada saat itu baru naik tahta Kerajaan Belanda bersamaan dengan mengumumkan mengenai suatu penyelidikan mengenai taraf kesejahteraan masyarakat yang berada di Jawa, pernah menyebutkan dalam pidato pembukaan Parlemen Belanda pada 17 September 1901 bahwa, “Negara Belanda mempunyai kewajiban untuk mengusahakan kemakmuran dari penduduk Hindia-Belanda.” (Anri Amrullah, 2017).

Setelah melalui berbagai macam polemik dan rintangan demi berlangsungnya kebijakan politik etis, akhirnya politik etis pun dapat dilaksanakan dengan menggunakna usulan dari Van Deventer. Politik Etis membawa perubahan pada bangsa Indonesia dalam 3 bidang. Yaitu; ekonomi, politik dan pendidikan.[[3]](#footnote-4) Ratu Wilhelmia kemudian menyusun kebijakan baru bagi daerah jajahan yang dirangkum dalam program *Trias Van Deventer[[4]](#footnote-5)* yang meliputi; (1) Irigasi (pengairan), yaitu membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian agar dapat meningkatkan jumlah produksi; (2) Imigrasi yakni mengajak penduduk untuk bertransmigrasi ke daerah lain dan mendorong tanah-tanah di luar Jawa untuk diolah menjadi lahan perkebunan yang juga dapat menambah penghasilan. Selain itu, juga guna mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa; (3) Edukasi yakni memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan. Untuk meningkatkan edukasi masyarakat di Indonesia pada masa itu, Belanda memberikan kesempatan bagi kalangan pribumi untuk mengemban pendidikan yang dibagi menjadi dua; pertama, golongan kelas satu bagi anak-anak pegawai negeri dan yang memiliki kedudukan atau kekayaan, dan kedua yaitu golongan kelas dua bagi anak-anak kaum pribumi pada umumnya.

Dalam penerapan program *Trias van Deventer* tersebut, awalnya Belanda benar-benar membangun dan menerapkannya pada masyarakat. Belanda memerhatikan rakyat pribumi dan membantu Indonesia saat sedang mengalami kesulitan. Meskipun mereka melakukannya dengan tidak menggunakan hati atau tidak ikhlas karena takut dikritik dan takut apabila mereka tetap membiarkan penderitaan penduduk pribumi terus-menerus, maka akan memicu timbulnya perlawanan dari rakyat secara meluas yang kolonialistik- eksploitatis, tetapi mereka benar-benar melaksanakan kebijakan yang telah disepakati tersebut.

1. **Penerapan Politik Etis di Nusantara**

Penerapan politik etis dimulai dari membuat irigasi atau pengairan yang penting bagi tanah pertanian, sampai dengan membangun banyak sekolah di Nusantara. Pada tahun 1885 dan 1930, pemerintah telah membangun saluran irigasi seluas 96.000 bahu atau sekitar 67.200 hektar untuk daerah Berantas dan Demak. Di tahun 1902, luasnya meningkat menjadi sekitar 121.100 hektar. Penduduk pribumi diarahkan untuk mengurusi proyek-proyek yang hanya berkaitan dengan infrastruktur saja, yaitu proyek pengairan yang dicanangkan oleh pemerintah meskipun tidak selalu berhasil. Dapat dikatakan, bahwa pemerintah kolonial Belanda gagal dalam membuat kebijakan yang dapat mendorong industrialisasi di Indonesia (Ricklefs, 2007: 325-326).



**Gambar 1**

Keterangan gambar 1: Di dalam foto terlihat bagaimana proses dibangunnya saluran irigasi di Sungai Sadang di Celebes, Sulawesi Selatan pada tahun 1930-an.

Dalam penerapan di bidang Transmigrasi atau perpindahan penduduk yang dilakukan oleh pemerintah Kolonial Belanda, tujuannya adalah untuk mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa. Karena akibat yang dapat ditimbulkan dari kelebihan dan kepadatan penduduk dapat berupa kemelaratan bagi seluruh rakyat di Pulau Jawa dan dikhawatirkan akan menimbulkan kerusuhan akibat gerakan rakyat lapar yang kemudian akan menghambat jalannya pemerintahan. Sehingga, perpindahan penduduk pun diperlukan, dan akhirnya dilaksanakan oleh suatu komisi yang bernama *Central Comisie Voor Emigratie En Kolonisatie Van Imheemsen* atau yang dalam bahasa Indonesia bernama Komisi Pusat Emigran dan Kolonisasi Pribumi.[[5]](#footnote-6)

Pada tahun 1865 terdapat sebanyak 14 juta penduduk di Pulau Jawa dan Madura atas arahan dari Pemerintah Belanda. Jumlahnya meningkat dua kali lipat pada tahun 1900-an sejak adanya Besluit atau surat keputusan pemerintah yang terbit pada 19 Oktober 1905 No. 46.[[6]](#footnote-7), maka perpindahan penduduk Jawa pun diselenggarakan. Sebagian penduduk bermigrasi dari Jawa ke Sumatera Utara untuk memenuhi permintaan sebagai tenaga kerja perkebunan. Selain itu, ada pula yang bermigrasi ke Lampung untuk menetap dan berkeluarga di sana. Hal ini menyebabkan persebaran penduduk Indonesia menjadi lebih merata dan tercampurnya orang-orang yang berasal dari suku Jawa dengan suku lain di pulau lain di Indonesia dan saling mengikat tali persaudaraan.

Para kolonis yang bermigrasi ke luar Pulau Jawa ini mendapatkan segala kebutuhannya. Seperti tempat tinggal sementara yang disebut Bedeng, alat pertanian, alat rumah tangga, bibit, bahkan tanah pekarangan dan juga persawahan dengan luas msing-masing sekitar 0,19 hektar. Biaya hidup selama 2 tahun dan biaya pembuatan rumah juga diberikan oleh pemerintah. Semua ini diberikan kepada para kolonis secara cuma-cuma atau gratis. Kemudian, untuk meta pencaharian para kolonis adalah bertani dan berternak. Adapun tambahan penghasilan didapat dari upah memburuh para penduduk asli. Para kolonis ini juga mendapat tugas dari pemerintah kolonial untuk membuat jalan dan saluran air atau irigasi. Sedangkan, untuk anak-anak kolonis diberikan pendidikan melalui pendirian sekolah rakyat di desa-desa yang diawasi oleh seorang inspektur. Di sekolah-sekolah ini, mereka diajarkan ilmu pengetahuan umum dan pelajaran bercocok tanam.[[7]](#footnote-8)

1. **Pendidikan di Hindia-Belanda, Khususnya di Yogyakarta**

Pendidikan pada masa itu tidak didasari oleh struktur yang teratur karena pendirian lembaga pendidikan hanya sebagai wujud usaha oleh pemerintah Belanda untuk mempermdah dalam pelaksanaan politiknya, meski begitu tidak dapat dipungkiri bahwa di tahun 1903 diketahui terdapat 14 sekolah di Ibukota Keresidenan dan 29 di Ibukota Afdeling. Sekolah tersebut mengajarkan cara membaca, menulis, berhitung, ilmu bumi dan alam, sejarah dan menggambar. Untuk kaum pribumi diketahui terdapat 245 sekolah negeri dan 326 sekolah partikelir atau sekolah swasta di Jawa dan Madura. Awalnya, pendidikan yang dapat ditempuh oleh kaum pribumi hanya sebatas untuk kaum priyayi atau orang berpunya saja, namun karena adanya kebutuhan birokrasi yang semakin meningkat, maka banyak anak priyayi rendah, dan bahkan orang biasa dapat masuk dan menempuh pendidikan di sekolah-sekolah yang sudah didirikan oleh Belanda dengan model pendidikan Barat.



**Gambar 2**

Keterangan gambar 2: Di dalam foto terlihat banyak sekali anak-anak dari kalangan pribumi yang bersekolah di sekolah khusus pribumi sekitar tahun 1910-an. Para murid pada masa itu diberi pelajaran mengenai ilmu pengetahuan dan ilmu-ilmu yang diajarkan dari Barat. Pada masa itu, sekolah-sekolah masih membebaskan pakaian muridnya, karena yang diutamakan adalah pendidikan yang diajarkan kepada pribumi Indonesia. terlihat, semuanya masih mengenakan pakaian daerah dan bahkan beberapa ada yang menggunakan blangkon dan ikat kepala.

Di bawah Abendanon, politik etis di bidang pendidikan yang terlaksana mengajarkan pola pendidikan bergaya Eropa dan pemakaian bahasa Belanda lebih diutamakan. Hal-hal yang dipelajari pun kebanyakan merupakan pelajaran umum dan pengetahuan untuk kemudian lulusannya diharapkan dapat menjadi pegawai pemerintah. Kemudian, untuk para pejabat di sekolah-sekolah dibimbing dan diajari untuk dapat melaksanakan kewajiannya dalam birokrasi pemerintahan nantinya. Masa penyelesaian pendidikannya dapat berlangsung selama 5 tahun untuk pendidikan di Sekolah Rendah Eropa (Galih, Dhimas Rangga & Artono, 2017: 757).

Di Yogyakarta sendiri, Pemerintah Belanda menjalankan politik pemisahan atau *Segregation,* yaitu politik yang dijalankan dengan cara diskriminasi ras yang dibagi menjadi tiga golongan, yaitu golongan Belanda, Pribumi dan Timur Asing atau China.[[8]](#footnote-9) Pendidikan pada masa kolonial Belanda dibagi menjadi tiga jenjang, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah umum, dan pendidikan kejuruan. Pada pendidikan dasar, terdapat sembilan jenis sekolah untuk golongan yang berbeda-beda. Ada *Europeesche Lagere School* (ELS) untuk anak-anak Belanda dan anak-anak Indonesia yang orang tuanya berpangkat tinggi, Sekolah Kelas I atau *Eerste Inlandse School* yang diberikan sejak kelas 3 sampai dengan kelas 5, dan *Hollandsch Inlandsche School* (HIS) yang merupakan perubahan dari Sekolah Kelas I pada tahun 1914 dan merupakan bagian dari Sekolah Barat. HIS memberi pelajaran Bahasa Belanda sejak kelas 3 dan mendapat banyak perhatian dari masyarakat karena diiming-imingi akan mempermudah mendapatkan pekerjaan. Saat ini, lokasi HIS ditempati oleh sebuah Sekolah Dasar Pojokusuman dan SMPN VI Jetis. Sekolah Kintelan dan yang semula sebagai *Eerste Inlandsche School* diganti menjadi Sekolah Kelas 2, dan Sekolah Sri Menganti berubah menjadi Sekolah Keputran. Budi Utomo juga sempat mendorong pemerintah kolonial pada tahun 1915 untuk memperbanyak sekolah-sekolah rendah dengan pengantar Bahasa Belanda.

Kemudian, ada pula *Hollandsch Chinesche School* (HCS) yang merupakan sekolah khusus untuk anak-anak Tionghoa atau China yang tidak mendapat tempat di sekolah pemerintah. Sekolah HCS sendiri pertama kali didirikan oleh pemerintah Belanda di Kampung Gandekan pada tahun 1912 yang sekarang telah berganti nama menjadi SMP Negeri 3 Yogyakarta dan masih beroperasi hingga sekarang. Ada setidaknya empat buah sekolah HCS yang didirikan di Yogyakarta, yaitu HCS Gubernemen di Gandekan, HCS Zending Protestan di Gemblakan yang didirikan pada 1917 dan sekarang menjadi SMP Bopkri 1, HCS Nasional atau HCS Mayor Yap Hong Sing yang didirikan pada 1921, dan HCS Katolik yang didirikan pada tahun 1934.[[9]](#footnote-10)

Sekolah Kelas 2 diadakan dalam beberapa tahap. Pada tahap pertama di tahun 1901, pemerintah Hinda Belanda di Keresidenan Yogyakarta mulai memperbanyak Sekolah Kelas 2 bagi semua masyarakat tanpa melihat keluarga atau status keturunan dan didirikan dua buah sekolah yakni di kampung Margoyasan dan Jetis. Tahap kedua dimulai pada tahun 1903 oleh Muhammadiyah yang menambah 3 buah Sekolah Kelas 2 di Ngabean, Pakualaman, dan di sebelah pintu gerbang Gading, dan pada tahun 1906 sekolah-sekolah ini menambah satu tahun masa didik menjadi sampai kelas 5. Pada tahap ketiga di tahun 1907, mulai muncul Sekolah Kasultanan dan Sekolah Pakualaman yang terletak di setiap kawedanan dan kapenewon di luar kota. Tahap keempat pada tahun 1919 sampai 1942, jumlah Sekolah Kelas 2 mencapai 13 buah dan belum termasuk yang berada di kabupaten.

*Volkschool* atau Sekolah Rakyat yang berdiri pada 1907 dan mengalami perubahan untuk memberi kesempatan lebih luas bagi yang ingin melanjutkan studi, *Vervolgschool* yang biasanya berjalan berdampingan dengan sekolah-sekolah desa, *Schakelschool* yang sederajat dengan HIS dan memberi kesempatan bagi murid-murid pandai, dan ada Sekolah Dasar Sejenis seperti yang dikhususkan untuk perempuan dan ada sekolah untuk anak-anak Ambon yang bernama *Ambonsche Burgerschool.*

Pada pendidikan menengah umum, terdapat dua sekolah yaitu *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO) dan *Algemene Middlebare School* (AMS). MULO yang dibuka secara resmi pada tahun 1914 merupakan sekolah kelanjutan dari HIS yang sejak zaman Jepang disebut dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sejak tahun 1903, pada beberapa sekolah rendah dibuka kursus MULO dengan memberikan pelajaran lanjutan yang hanya dapat dikunjungi oleh anak-anak Belanda. Awalnya, pendidikan di MULO hanya ditenempuh selama 2 tahun namun kemudian ditambah menjadi 3 tahun. Perubahan dari kursus menjadi MULO ini tentunya membawa perubahan yang penting pula. Seperti sekolah yang semula hanya untuk anak-anak Belanda saja, kini terbuka untuk anak-anak pribumi yang telah tamat HIS.

Sekolah MULO di Yogyakarta berlokasi di Ngupasan. Dalam perkembangannya, MULO yang ada tidak dapat menampung keinginan masyarakat untuk bersekolah, sehingga terdapat beberapa badan swasta yang juga mendirikan MULO, yaitu Muhammadiyah, Yayasan Netral, dan *Chistelijk MULO*  (Katolik).[[10]](#footnote-11)

*Algemene Middlebare School* atau yang disingkat AMS merupakan sekolah yang sudah lebih tinggi dari MULO. Pada masa Jepang, sekolah ini disebut dengan Sekolah Menegah Tinggi yang sekarang menjadi Sekolah Menengah Atas atau SMA. Jenjang pendidikan ini dilalui saat mereka yang belajar akan melanjutkan ke Perguruan Tinggi. Pada masanya, AMS dibagi menjadi dua peminatan pembelajaran, yaitu pada bagian satu mempelajari mengenai Ilmu Pengetahuan Alam Kebudayaan yang meliputi Kesusatraan Timur, dan Kesusastraan Klasik Barat, dan bagian dua yang mempelajari mengenai Ilmu Pengetahuan Alam. Di Yogyakarta sendiri, AMS bagian dua didirikan pada tahun 1919 yang sekarang menjadi SMAN 3 Padmanaba dan masih beroperasi hingga kini.[[11]](#footnote-12)

Pendidikan Kejuruan yang mana pada pelaksanaannya dibagi menjadi beberapa sekolah sesuai dengan jurusan yang akan dipelajari. Ada Sekolah Pertukangan yang mencetak tukang-tukang biasa dan yang dapat mengisi jabatan rendah untuk mengawasi mesin dengan menjadi montir, masinis, dsb, dan Sekolah Teknik yang mulai berkembang pada awal abad 20-an bersamaan dengan berkembangnya perusahaan-perusahaan teknik. Di Yogyakarta, salah satu Sekolah Teknik adalah *Prinses Yuliana School*  yang berlokasi di Jetis dan sekarang telah berubah menjadi SMK 2 dan 3 Yogyakarta dan masih beroperasi.[[12]](#footnote-13) Kemudian, ada Sekolah Dagang atau *Handelschool* yang bertujuan untuk memenuhi perusahaan-perusahaan Eropa yang sedang berkembang pesat pada masa itu. Sekolah ini bernama *Djokjasche Handel School* (DHS) di Jetis dan *Nationale Handel School* (NHS) di Bintaran.

Selain itu, ada pula Sekolah Kejuruan Wanita yang bernama *Maisjes Vakschool* dan Sekolah Guru yang mana terdapat dua di Yogyakarta, yaitu *Kweekschool,* dan *Noormalschool.* Lembaga keguruan ini merupakan yang tertua dan sudah ada sejak awal abad ke-19. Sekolah Guru tertua yang didirikan di Yogyakarta dibuka pada tahun 1897 semula bernama *Kweekschool voor Inlandsche Onderwijzer* atau juga dikenal dengan nama Sekolah Raja. Kemudian, pada abad ke-20 saat pendidikan sudah jauh lebih berkembang, Pendidikan Guru juga mengalami perubahan dan terdapat tiga macam. Pertama, *Normaalschool* atau Sekolah Guru dengan masa pendidikan empat tahun dan berbahasa pengantar bahasa daerah. Kedua, *Kweekschool* atau Sekolah Guru empat tahun yang menerima lulusan sekolah dasar berbahasa pengantar Bahasa Belanda. Ketiga, *Hollands Inlandsche Kweekschool* atau Sekolah Guru enam tahu yang berbahasa pengantar Bahasa belanda dan bertujuan untuk menghasilkan guru-guru untuk HIS dan HCS.

1. **Hollandsch Indische School di Yogyakarta dan Perkembangannya**

*Hollandsch Inlandsche School* (HIS) yang merupakan perubahan dari Sekolah Kelas I pada tahun 1914 dan merupakan bagian dari Sekolah Barat memberi pelajaran Bahasa Belanda sejak kelas 3 dan mendapat banyak perhatian dari masyarakat karena diiming-imingi akan mempermudah mendapatkan pekerjaan. Meski begitu, sekolah HIS ini sebenarnya berada pada jenjang Pendidikan Rendah atau *Lager Onderwijs* yang setingkat dengan pendidikan dasar di masa sekarang.[[13]](#footnote-14) HIS menggunakan bahasa pengantar *Westernsch Lager Onderwijs* atau Bahasa Barat yang mana Bahasa Belanda dan *Inlandsche School* yang mennggunakan bahasa daerah yang mana adalah bahasa Jawa.[[14]](#footnote-15)

Didirikan pada tahun 1914 atas usulan dari Budi Utomo yang menginginkan adanya kemajuan di bidang kebudayaan adan pendidikan bagi kaum bumi putera. HIS di Jetis merupakan salah satu Sekolah Kelas I Negeri di Yogyakarta yang mengajarkan Bahasa Belanda dengan lama pendidikan selama 7 tahun.[[15]](#footnote-16) Sekolah HIS ini dibangun untuk mengajarkan penduduk pribumi yang pada umumnya disediakan untuk anak-anak dari kalangan bangsawan, tokoh-tokoh terkemuka, atau pegawai negeri. Selain HIS, di Jetis juga terdapat fasilitas pendidikan lainnya pada masa kolonial seperti *Kweekschool,* Sekolah Latihan Guru, dan *Princess Juliana School.* Ketiga sekolah tersebut saat ini telah beralih fungsi menjadi sekolah untuk masyarakat Indonesia pada umumnya, yaitu SMAN 11 Yogyakarta, SD Jetisharjo, dan SMKN 2 Yogyakarta.

Peraturan pendidikan dasar yang digunakan pada masa kolonial Belanda untuk masyarakat pertama kali dikeluarkan pada tahun 1848, di mana pendidikan dasar haruslah ada pada setiap keresidenan, kabupaten, kawedanan, dan atau pusat-pusat kerajinan, perdagangan atau yang dianggap perlu. Peraturan selanjutnya dikeluarkan pada tahun 1898 dan diterapkan pada 1901 berbarengan dengan dicanangkannya Politik Etis di Nusantara.

Dijelaskan bahwa di masa kolonial, anak-anak yang dapat masuk HIS haruslah sudah berusia 6 tahun dan tidak ada Kelompok Bermain, Taman Kanak-kanak, atau *Voorbels,* sehingga dapat langsung masuk dan belajar selama 7 tahun untuk kemudian dapat melanjutkan di sekolah menengah seperti MULO, *Hoogere Burgerschool* (HBS) atau *Kweekschool.[[16]](#footnote-17)* Bagi masyarakat yang merupakan keturunan Tionghoa biasanya memilih untuk masuk ke *Hollandsch Chineesche School* (HCS) karena adanya diskriminasi ras pada masa itu, dan selain menggunakan bahasa pengantar Belanda, HCS juga memberikan pelajaran dengan menggunakan bahasa pengantar Tionghoa atau China.[[17]](#footnote-18) Selain HIS dan HCS, di luar peraturan pemerintah Hindia Belanda pada masa itu terdapat pula pihak swasta yang mendirikan sekolah seperti Taman Siswa, Perguruan Rakyat, dan pada pendidikan Islam yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah terdapat Pondok Pesantren.

Perubahan terjadi pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Setelah mengalami penutupan sementara sekolah-sekolah yang dibangun Belanda, saat mulai beroperasi kembali bangunan HIS dialih fungsikan dan digunakan untuk Sekolah Rakyat. Sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa pengantar bahasa Belanda diganti dengan menggunakan bahasa Jepang namun dalam kesehariannya diperbolehkan menggunakan bahasa Indonesia, dan Sekolah Dasar untuk anak-anak dibagi menjadi dua, yaitu Sekolah Pertama atau *Shoto Kokumin Gakko,* dan Sekolah Rakyat atau *Kokumin Gakko.[[18]](#footnote-19)* Akibat kekurangan tenaga pengajar dan ketidaklancaran pembelajaran dengan metode baru menjadikan Pemerintah Jepang mengeluarkan Undang-undang No. 12 yang mengizinkan dibukanya kembali perguruan tinggi untuk menciptakan guru-guru yang kemudian dapat digunakan untuk mencapai persemakmuran Timur Raya. Para pelajar yang ingin masuk dan mempelajari ilmu pengetahuan juga sudah tidak dibatasi hanya pada kaum bangsawan dan priayi saja, namun juga dari kalangan rakyat biasa dan umum. Hal ini tentunya mendapat respon positif dari masyarakat.

 

**Gambar 3 dan 4**

Keterangan gambar 3 : Para murid melakukan Taisho setiap pagi sebelum mulai beraktifitas sebagai aturan baru pada masa Pemerintahan Jepang.[[19]](#footnote-20)

Keterangan gambar 4 : Para murid yang mengadakan latihan berbaris dengan membawa cangkul.[[20]](#footnote-21)

Pendidikan di masa Jepang lebih difokuskan pada pendidikan untuk kesiapan militer dan perang, bertolak belakang dengan Belanda yang mempersiapkan para murid pribumi untuk bekerja bagi pemerintahan Belanda.[[21]](#footnote-22) Tujuan yang berbeda ini tentunya juga memberi dampak pada hal-hal yang diajarkan sekolah kepada para murid. Murid-murid yang bersekolah di Sekolah Rakyat diberi pelatihan fisik, latihan militer, dan doktrinisasi yang kuat untuk menjadi prajurit dalam Perang Asia Timur Raya. Waktu pendidikan yang sebelumnya ditempuh selama 7 tahun juga diubah menjadi hanya 6 tahun, diikuti dengan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama selama 3 tahun, dan Sekolah Menengah Atas selama 3 tahun. Sistem ini kemudian diadopsi menjadi kurikulum pendidikan saat ini di Indonesia.

Berkecambuknya Perang Dunia II menjadikan Belanda berhasil menduduki kembali tanah air menjadikan sekolah-sekolah di Nusantara dan di Yogyakarta dihentikan dan dialih fungsikan. Bangunan HIS sendiri dialih fungsikan oleh Belanda untuk menjadi salah satu markas Belanda. Barulah pada tahun 1949, setelah kemerdekaan bangunan tersebut dipergunakan kembali sebagai fasilitas untuk menempuh pendidikan. Tahun 1950-an hingga 1962, bangunan HIS dipergunakan untuk Sekolah Guru A, dan setelahnya, mulai dari tahun 1962 hingga sekarang lokasi dari bangunan HIS ditempati oleh sebuah Sekolah Dasar Pojokusuman dan SMPN VI Jetis yang keduanya masih beroperasi hingga saat ini.[[22]](#footnote-23)

1. **Dampak yang Ditimbulkan dari Adanya Politik Etis**

Meskipun banyak pro dan kontra yang menyelimuti kebijakan Politik Etis. Juga dengan adanya berbagai oknum yang menyalahgunakan kebijakan ini, tidak dapat dipungkiri bahwa dampak yang ditimbulkan dari kebijakan Politik Etis sangatlah banyak, diantaranya adalah pembangunan infrastruktur seperti sekolah, pembuatan rel kereta api dan bendungan yang awalnya hanya dibangun demi kepentingan pemerintah Belanda sendiri, terutama dalam mengangkut komoditas yang diperlukan. Namun, pada akhirnya juga memudahkan pekerjaan masyarakat Indonesia pada masa itu, bahkan hingga sekarang. Kemudian, memberikan kesempatan bagi masyarakat pribumi untuk mengenyam pendidikan dan belajar mengenai pengetahuan umum yang kemudian dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Terdapatnya berbagai sekolah yang didirikan dan diajarkannya banyak ilmu pengetahuan, menjadikan munculnya banyak kaum terpelajar yang nantinya menjadi pelopor Pergerakan Nasional seperti Soetomo atau Mahasiswa STOVIA yang mendirikan Budi Utomo.[[23]](#footnote-24) Para kaum terpelajar inilah yang kelak memimpin pergerakan dan perjuangan demi mendapatkan keadilan dan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Dijajahnya Indonesia oleh bangsa Barat, khususnya Belanda tentu saja tidak tertinggal mengenai terdapat akulturasi budaya antara bangsa Barat dengan Indonesia. Awalnya, bangsa Belanda enggan untuk memberitahu dan memperkenalkan bahasa dan budayanya kepada para pribumi, namun karena situasi sekolah-sekolah yang didirikan dalam pengajarannya harus mengguakan bahasa Belanda, maka mau tidak mau bangsa Indonesia juga menggunakan bahasa Belanda. dimulai dari bahasa lah, akhirnya kebudayaan, pakaian dan gaya hidup orang-orang Belanda juga menjadi tercampur dengan para penduduk pribumi.

Komponen pendidikan dalam politik etis ini berkontribusi signifikan pada kebangkitan rasa nasionalisme bangsa Indonesia dengan menyediakan alat-alat intelektual bagi para elite masyarakat Indonesia untuk mengorganisir dan menyampaikan kritik-kritik mereka terhadap pemerintah kolonial, khususnya sejak tahun 1908. Politik Etis ini memberikan kesempatan bagi rakyat melalui sistem edukasi, untuk memahami ide-ide politik Barat mengenai kemerdekaan dan demokrasi, sehingga muncul banyak kelompok priayi baru Jawa yang merupakan sumber utama nasionalisme. Kebanyakan anggota perkumpulan nasionalisme, seperti Boedi Oetoemo, Comite voor het Javaans Nationalisme, dan Jong Java berasal dari kelompok masyarakat nasionalis ini.[[24]](#footnote-25)

Untuk pertama kalinya orang-orang pribumi mulai mengembangkan kesadaran nasional yang sama sebagai 'orang Indonesia'. Hal ini menyebabkan banyak sekali bibit-bibit perjuangan dalam diri rakyat dan menjadikan mereka mampu mendirikan organisasi-organisasi dengan gerakan politik lokal. Gerakan politik lokal yang berlandaskan rasa nasionalisme ini menimbulkan banyak perhimpunan-perhimpunan Indonesia yang melahirkan tokoh-tokoh politik nasional seperti Sutan Sjahrir, Sutomo, Ali Sastroamidjojo, Achmad Soebardjo, Iwa Kusuma Sumantri, Iskak, Sartono, Soenaryo, dan masih banyak lagi. Tidak lupa pula selama awal abad ke-20 di Hindia Belanda muncul sejumlah partai politik, seperti Insulinde Partij pada tahun 1907 dan Indische Partij pada tahun 1909.[[25]](#footnote-26)

Awalnya, pemerintah kolonial Belanda mengizinkan pendirian gerakan-gerakan politik lokal ini. Namun, ketika ideologi Indonesia diradikalisasi pada sekitar tahun 1920-an, seperti yang nampak dalam pemberontakan-pemberontakan komunis di Jawa Barat dan Sumatra Barat pada tahun 1926 dan 1927, pemerintah kolonial Belanda pun merubah kebijakannya. Sebuah rezim yang relatif toleran digantikan dengan rezim represif yang menekan semua tindakan yang diduga subversif dari rakyat pribumi. Rezim represif ini justru memperparah keadaannya dengan meradikalisasi seluruh gerakan nasionalis Indonesia. Sebagian dari para nasionalis ini kemudian mendirikan Partai Nasionalis Indonesia (PNI) pada tahun 1927 sebagai sebuah reaksi terhadap rezim yang represif. Tujuannya adalah mencapai kemerdekaan penuh untuk Indonesia.

**Simpulan**

Seperti kebijakan lainnya, Politik Etis jika dilihat dari ide dan penerapannya merupakan hal yang sangat baik dan menguntungkan bagi masyarakat Indonesia. Program *Trias van Deventer* yang diterapkan pada masa kolonial benar-benar membantu dan menyejahterakan kaum pribumi Nusantara, dan bahkan membantu dalam memunculkan rasa nasionalisme dan perkembangan ilmu pengetahuan bagi kaum muda dan terpelajar. Apalagi dengan didirikannya banyak sekolah-sekolah mulai dari Sekolah Dasar seperti *Hollandsch Indische School* dan *Hollandsch Chinesche School* hingga sekolah Tinggi untuk kaum Pribumi, meski dalam penerapannya tetap saja hanya orang-orang berkasta tinggi yang dapat mengenyam pendidikan. Dengan banyaknya pro dan kontra yang terjadi membuktikan bahwa dalam penerapannya sekalipun tidak selalu membawa hal positif namun juga negatif.

**Daftar Pustaka**

Poeze, Harry A., Cornelis Dijk, & Inge van der Meulen. 2008. Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Negeri Belanda, 1600-1950. Jakarta, KPG & KITLV

Sartono Kartodirjo, Protest Movement in Rural Java, (Kuala Lumpur : Oxford University Press, 1973)

Hoesein, Rushdy. 2010. Terobosan Soekarno dalam Perundingan Linggarjati. Jakarta: Penerbit Buku Kompas

Wertheim, W. F. 1956. Indonesian Society in Transition. The Hague & Bandung. W. van Hoeve Ltd.

R. van Niel. 1984. Munculnya Elite Modern Indonesia. Jakarta : Pustaka Jaya

Aspahani, Hasan. 2016. *Chairil.* Jakarta : Gagas Media

Kuswono K. Umi Hartati, Kian Amboro, dan Novita Mujiyati. 2019. Metro Tempo Dulu: Sejarah Era Kolonisasi 1935-1942. Pendidikan Sejarah UM Metro

Ardi, Pradata, dkk. 2022. Dinamika Sejarah Perkembangan Pendidikan di Wilayah Indonesia. Jawa Tengah: Lakeisha

Handayani, Titi. 2020. Sekolah Pada Masa Kolonial di Yogyakarta. Yogyakarta: Jogja Heritage Society

K. S., Yudiono. 2010. Pengantar Sejarah Sastra Indonesia. Jakarta: Grasindo

Steenbrink, Karel. 2007. Catholics in Indonesia: 1808-1942. Leiden: Brill

Post, Peter, dkk. 2009. The Encyclopedia of Indonesia in The Pacific War: In Cooperation with the Netherlands Institute for War Documentation. Leiden: Brill

Setiaji, Aris Himawan. 2011. Wanita Jawa dalam Pendidikan Kolonial. Surakarta: Jurnal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surakarta

1. Harry A. Poeze, Cornelis Dijk, & Inge van der Meulen, Di Negeri Penjajah: Orang Indonesia di Negeri Belanda, 1600-1950, (Jakarta, KPG&KITLV, 2008) hlm 25 [↑](#footnote-ref-2)
2. Sartono Kartodirjo, Protest Movement in Rural Java, (Kuala Lumpur : Oxford University Press, 1973) [↑](#footnote-ref-3)
3. Gambaran mengenai Politik Etis ini berdasarkan Penders, Indonesia, …, hlm 171-176; juga Sartono Kartodirjo, Pengantar Sejarah Indonesia 2*,* khususnya Bab I dan II [↑](#footnote-ref-4)
4. Hasan Aspahani, *Chairil,* (Jakarta : Gagas Media, 2016) hlm 20 [↑](#footnote-ref-5)
5. Kuswono K. Umi Hartati, Kian Amboro, dan Novita Mujiyati, Metro Tempo Dulu: Sejarah Era Kolonisasi 1935-1942, (Pendidikan Sejarah UM Metro, 2019) hlm 14-15 [↑](#footnote-ref-6)
6. Ibid hlm 16 [↑](#footnote-ref-7)
7. Ibid hlm 17 [↑](#footnote-ref-8)
8. Pradata Ardi, dkk, Dinamika Sejarah Perkembangan Pendidikan di Wilayah Indonesia, (Jawa Tengah: Lakeisha, 2022) hlm 66 [↑](#footnote-ref-9)
9. Titi Handayani, Sekolah Pada Masa Kolonial di Yogyakarta, (Jogja: Jogja heritage Society, 2020) [↑](#footnote-ref-10)
10. Ibid [↑](#footnote-ref-11)
11. Galih Pranata, Sekolah Van Deventer, Jejak Lahirnya Guru-guru, (nationalgeographic.com, 2021) [↑](#footnote-ref-12)
12. Aris Himawan Setiaji, Wanita Jawa dalam Pendidikan Kolonial, (Surakarta: Jurnal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surakarta, 2011) [↑](#footnote-ref-13)
13. Dhea Adela, Buku Ajar Filsafat, (Nusa Putra Press, 2021) hlm 56 [↑](#footnote-ref-14)
14. Didi Junaedi, Pahlawan-pahlawan Indonesia Sepanjang Masa, (Yogyakarta: Indonesia Tera, 2014) hlm 289 [↑](#footnote-ref-15)
15. Ibid hlm 289 [↑](#footnote-ref-16)
16. Yudiono K. S., Pengantar Sejarah Sastra Indonesia, (Jakarta: Grasindo, 2010) hlm 61-63 [↑](#footnote-ref-17)
17. Karel Steenbrink, Catholics in Indonesia: 1808-1942, (Leiden: Brill, 2007) hlm 66-67 [↑](#footnote-ref-18)
18. Peter Post, dkk, The Encyclopedia of Indonesia in The Pacific War: In Cooperation with the Netherlands Institute for War Documentation, (Leiden: Brill, 2009) hlm 332 [↑](#footnote-ref-19)
19. Koran Asia Raya, 1943 [↑](#footnote-ref-20)
20. Ibid [↑](#footnote-ref-21)
21. Yudiono, hlm 62 [↑](#footnote-ref-22)
22. Sejarah SMP Negeri 6 Yogyakarta, (Situs Resmi SMPN 6 YK) [↑](#footnote-ref-23)
23. Perkataan Van Niel, bahwa elit intelektual Indonesia lahir dari perluasan dan pengembangan pendidikan barat dalam masa Politik Etis (Lih. Van Niel, op.cit., khususnya Bab Pendahuluan) [↑](#footnote-ref-24)
24. School toto Oplending van Inlandsche Artsen (STOVIA), pendirinya adalah Soetomo, Dunawan Mangunkusumo, Soewarno, Goembreg, Mohamad Saleh, Soelaiman. Lihat, Akira Nagazumi, Bangkitnya Nasionalisme Indonesia, hlm 64-65 [↑](#footnote-ref-25)
25. Indische Partij didirikan oleh tiga serangkai, yaitu Tjipto Mangoenkoesoemo, Douwes Dekker, dan Ki Hajar Dewantara (Suwardi Suryadiningrat) [↑](#footnote-ref-26)